PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), TINGKAT UPAH MINIMUM, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2022

Laila Mukaromah¹, Zakia Hanifatuzzahra², Ade Nasrullah³, Tiara Mukti Latifah⁴,
Vitriyani Tri Purwaningsih⁵, I Wayan Suparta⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

e-mail : ¹⁾laila.mukaromah21@students.unila.ac.id, ²⁾zakia.hanifatuzzahra21@students.unila.ac.id,

³⁾ade.nasrullah2001@students.unila.ac.id, ⁴⁾tiara.muktilatifah2075@students.unila.ac.id,

⁵⁾vitriyani.tri@feb.unila.ac.id, ⁶⁾wayan.suparta@feb.unila.ac.id

ABSTRAK

Indoensia menurut data dari menteri perekonomian bahwa pada triwulan IV-2022 pertumbuhan ekonomi telah tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Dalam tahun penuh, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 tercatat telah mengalami pertumbuhan yang impresif sebesar 5,31%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yakni sebesar 5,2%, dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022. Dilakukan analisis regresi pengaruh IPM, UMP dan tingkat pengangguran terhadap laju pertumbuhan PDRB harga konstan pada masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis data Cross Section dengan data sekunder yang diperoleh dari Website BPS. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Squared. Kesimpulan yang didapatkan adalah IPM, upah minimum dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada upah minimum dapat berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di Indonesia tahun 2022. Dengan Uji F menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPM, UMP dan tingkat pengangguran secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variasi IPM, UMP, dan tingkat pengangguran, menurut koefisien determinasi (R-Square), hanya mampu menyumbang 4,31% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022.

Kata kunci : IPM, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum.

ABSTRACT

Indonesia according to data from the minister of economy that in the fourth quarter of 2022 economic growth has grown by 5.01% (yoy). In the full year, Indonesia's economic growth throughout 2022 was recorded to have experienced impressive growth of 5.31%. This figure exceeded the target set by the Government of Indonesia, which was 5.2%, and again reached the level of 5% as before the COVID-19 pandemic. Based on these problems, it is necessary to know what factors affect the economic growth of each province in Indonesia in 2022. The purpose of this study is to find out what factors affect the economic growth rate in Indonesia in 2022. A regression analysis of the effect of HDI, UMP and unemployment rate on the growth rate of GDP at constant prices in each province in Indonesia was carried out in 2022. This study used a quantitative approach and Cross Section data type with secondary data obtained from the BPS Website. The method used is Ordinary Least Squared. The conclusion obtained is that HDI, minimum wage and unemployment rate do not have a significant effect on economic growth, but the minimum wage can have a positive effect on the economic growth of each province in Indonesia in 2022. With Test F showing that in 2022, HDI, UMP and unemployment rate

simultaneously (together) have no significant effect on economic growth. The variation of HDI, UMP, and unemployment rate, according to the coefficient of determination (R-Square), is only able to contribute 4.31% to Indonesia's economic growth in 2022

Keywords: *Economic Growth, Employment, HDI, Minimum Wage.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menurut data dari menteri perekonomian bahwa pada triwulan IV-2022 pertumbuhan ekonomi telah tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Dalam tahun penuh, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 tercatat telah mengalami pertumbuhan yang impresif sebesar 5,31%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yakni sebesar 5,2%, dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Selama ini pembahasan pada pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah parameter pada penilaian kinerja suatu perekonomian, khususnya dalam melakukan analisa terkait hasil dari usaha pada pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah atau suatu negara. Bentuk dari adanya pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan mengenai sejauh apa kegiatan ekonomi dapat dihasilkan dan memperoleh penghasilan masyarakat dalam suatu periode. Apabila seluruh bentuk riil upah yang diberikan kepada pemakai produksi di suatu periode menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, maka dapat diartikan bahwa perekonomian telah mengalami pertumbuhan. Parameter yang digunakan ketika akan mengukur sebuah pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan (N. M. S. Dewi & Sutrisna, 2015).

Kualitas dari sumber daya manusia menjadi sebuah indikator pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Modal yang berdasarkan pada manusia apabila memiliki kualitas yang tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya produktivitas suatu negara. Bentuk modal manusia dikatakan berkualitas baik salah satunya dengan melihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan penelitian (Nainggolan et al., 2021), IPM dijadikan suatu parameter sebagai taraf kualitas modal manusia terhadap pembangunan perekonomian suatu negara dengan diindikasikan beberapa faktor pengukurannya yaitu dari segi tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Indikator ekonomi. Indonesia memiliki modal SDM sebagai faktor pendorong pembangunan ekonomi yang bisa diandalkan. Namun, besaran SDM di Indonesia ini masih berkualitas rendah. Jika Indonesia telah mempunyai SDM baik

dan tinggi, ini bisa menjadikan sebuah modal manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing oleh negara lain.

(N. L. S. Dewi & Sutrisna, 2014) telah menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan yang tinggi mengenai keterlibatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia. Tingginya tingkat pembangunan manusia merupakan sebuah tolok ukur dari sumber daya manusia dalam penyerapan serta pengendalian pertumbuhan ekonomi baik secara teknologi maupun sarana kelembagaan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian menjadi lebih baik. Salah satu yang menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan. Terdapat banyak sekali dampak yang diakibatkan dari kemiskinan sebagai permasalahan kemasyarakatan, artinya bahwa kemiskinan ini memberi pengaruh dalam kemajuan dari pertumbuhan ekonomi. Dengan angka kemiskinan yang tinggi dapat mempengaruhi anggaran pembangunan, hal ini akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Rasio jumlah total orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja dikenal sebagai tingkat pengangguran. Mirip dengan bagaimana kemiskinan mempengaruhi daya beli masyarakat, tingkat pengangguran terbuka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan atau bahkan melambat, sehingga diperlukan solusi dari masalah pengangguran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Seperti dalam penelitian (Arifin & Fadllan, 2021), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, namun tidak signifikan, dan dari hasil uji parsial IPM berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum adalah jumlah uang paling sedikit yang diberikan oleh pemberi kerja di bidang atau industri tertentu untuk membayar karyawan mereka. Salah satu masalah utama kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia adalah upah minimum yang telah berkembang menjadi topik krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan karyawan. Sejarah upah minimum Indonesia dapat dilihat dari beberapa fungsi adanya upah minimum. Pertama, upah minimum sangat dipengaruhi oleh sejarah konflik perburuhan dan gerakan serikat buruh. Buruh dan serikat pekerja telah mendorong kenaikan upah minimum selama beberapa dekade terakhir sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kondisi kerja (Anwar, 2019).

Kedua, upah minimum merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam kebijakan perlindungan sosialnya. Pemerintah bertujuan untuk melindungi pekerja dari penyalahgunaan dan eksploitasi majikan dengan menetapkan upah minimum yang adil. Selain itu, diantisipasi bahwa menaikkan upah minimum akan mendorong konsumsi domestik dan ekspansi ekonomi yang stabil. Hal ini dimaksudkan agar dengan membayar pekerja dengan upah layak yang layak, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. Upah minimum di Indonesia juga menghadapi sejumlah kesulitan dalam penerapannya. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain perbedaan antara upah minimum dan kenaikan biaya hidup, sulitnya meminta pemberi kerja untuk membayar upah minimum, dan perubahan upah minimum yang mempertimbangkan masalah pemerataan dan kelayakan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi hambatan ini dengan terus meninjau dan menyempurnakan kebijakan upah minimumnya. Hal ini memerlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja serta perubahan undang-undang yang mengatur penetapan dan penyesuaian upah minimum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022. Pada penelitian ini, dilakukan analisis regresi pengaruh IPM, UMP dan tingkat pengangguran terhadap laju pertumbuhan PDRB harga konstan pada masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Telah banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan 3 variabel yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks gabungan yang terdiri atas tiga domain dasar pada kategori pembangunan manusia, yaitu pengetahuan, angka harapan hidup, dan standar hidup layak. Teori *human capital* menurut (Naphat Wuttaphan, 2017) berusaha menjelaskan fenomena tersebut menggunakan sudut pandang ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa untuk berinvestasi dalam human capital. Keunggulan kompetitif dan keberlanjutan dalam dunia bisnis yang kompleks

akan diperoleh. Teori *human capital* adalah pengukuran modal manusia memiliki banyak modal manusia dan implikasi pengembangan sumber daya manusia.

2.2 Upah Minimum

Upah didefinisikan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan kepada seseorang dalam hubungan kerja. Upah dapat berupa uang atau pun barang yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarga penyedia jasa. Dalam ekonomi, upah merupakan pembayaran yang diperoleh dari berbagai jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada penyedia jasa (Teneh et al., 2019). Besaran upah di Indonesia diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dan para pekerja dengan upah minimum yang telah diatur oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum. Upah minimum adalah upah terendah bulanan yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan dalam bentuk uang yang besarnya mengikuti ketentuan perundang-undangan (Herlina & Bakar, 2023). Tingkat upah minimum dijadikan sebagai tolok ukur yang bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena semakin meningkatnya upah minimum akan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja dan membuat usaha yang akan berdampak pada peningkatan nilai produksi (Putra et al., 2019).

2.3 Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan sebutan untuk angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak (Marini & Putri, 2020). Teori Keynes menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan tenaga kerja, yang terjadi adalah upah akan mengalami penurunan. Hal ini akan menjadi kerugian, karena penurunan upah akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Sehingga produsen akan mengalami kerugian dan tidak lagi dapat menyerap tenaga kerja (Adriyanto et al., 2020)

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang kemudian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan terjadinya peningkatan pada kemakmuran masyarakat (Rofii & Ardyan, 2017). Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan pemerintah yang diterapkan serta dilaksanakan dalam bidang ekonomi (Fitriani et al., 2018).

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagian riset sebelumnya telah menginvestigasi hubungan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat upah, dan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejumlah penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika faktor-faktor tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi negara ini. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian yang relevan:

Hasil penelitian (Arifin & Fadllan, 2021), menunjukkan adanya hubungan antara aspek isi yang diteliti dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan temuan penelitian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dipengaruhi secara negatif oleh pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pengangguran dapat merugikan ekspansi ekonomi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran berpengaruh negatif, namun tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu yang dianalisis. Kajian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara signifikan dan parsial dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menyiratkan bahwa peningkatan IPM, yang mempertimbangkan unsur-unsur seperti pendapatan per kapita, kesehatan, dan pendidikan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di Provinsi Jawa Timur dapat difasilitasi oleh pembangunan manusia yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat upah, dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta antara 2011 dan 2017 semuanya terkait, menurut penelitian (Nenggar, 2019). Berdasarkan temuan studi tersebut, ada beberapa kesimpulan menarik tentang bagaimana karakteristik

tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut penelitian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berkorelasi positif. Temuan ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di daerah tersebut difasilitasi oleh peningkatan IPM, yang memperhitungkan unsur-unsur seperti pendapatan per kapita, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan negatif antara tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan dari peningkatan tingkat upah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya beban ekonomi tambahan diberikan untuk pelaku usaha dan perusahaan ketika tingkat upah meningkat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hasil penelitian (Hartanti, 2019) mengenai “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2010-2016” mengidentifikasi adanya hubungan atau keterkaitan yang positif dan signifikan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari 2010 hingga 2016. Pengetahuan yang lebih dalam tentang dinamika perekonomian Indonesia dan dampak dari faktor-faktor tersebut diberikan oleh penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, perkembangan ekonomi Indonesia cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa angka pengangguran yang tinggi tidak selalu menjadi penghambat kemajuan ekonomi dalam konteks bangsa ini. Di sisi lain, kenaikan tingkat pengangguran sebenarnya dapat membantu perekonomian Indonesia berkembang.

2.6 Model Penelitian dan Hipotesis

Model penelitian ini digambarkan seperti berikut ini.

Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Dan hipotesis dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ho: Tidak ada pengaruh antara indeks pembangunan manusia (IPM) (X1) dan pertumbuhan ekonomi (y).

Ha: Terdapat pengaruh positif antara indeks pembangunan manusia (IPM) (X1) dan pertumbuhan ekonomi (y), artinya semakin tinggi IPM, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Upah Minimum

Ho: Tidak ada pengaruh antara tingkat upah minimum (X2) dan pertumbuhan ekonomi (y).

Ha: Terdapat pengaruh positif antara tingkat upah minimum (X2) dan pertumbuhan ekonomi (y), artinya semakin tinggi tingkat upah minimum, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Pengangguran

Ho: Tidak ada pengaruh antara tingkat pengangguran (X3) dan pertumbuhan ekonomi (y).

Ha: Terdapat pengaruh negatif antara tingkat pengangguran (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (y), artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah pertumbuhan ekonomi.

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan *Ordinary Least Squared* (OLS) dengan jenis data *Cross Section* dari Variabel Independen (IPM, Tingkat Upah Minimum, Tingkat Pengangguran), dan pada variabel dependen terkait pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2022 dengan data laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan. Data yang diolah menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan data sekunder bersumber dari beberapa literatur dari buku, artikel maupun jurnal, website, serta data dari BPS Provinsi tahun 2022 di Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Hasil uji regresi data *cross section* dilakukan melalui langkah-langkah dari awalan pencarian data hingga kepada pengelolaan data. Tahapan pertama, dengan mengestimasi model regresi data *cross section*. Kemudian dilakukan dengan Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji T dan Uji F, yang secara statistik sebagai pengujian akan kebenaran suatu asumsi atau hipotesis yang dianggap benar pada data observasi yang sudah ada. Kemudian Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas yang dilakukan untuk melihat apakah model pendugaan yang dibuat tidak menyimpang dari asumsi konvensional. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah asumsi konvensional telah berubah.

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Table 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Observasi	Probabilitas
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	34	0.0000
IPM (X ₁)	34	0.1561
Tingkat Upah Minimum (X ₂)	34	0.0190
Tingkat Pengangguran (X ₃)	34	0.4324

Sumber: Olahan Data, 2023

Dari hasil tersebut, bisa diperhatikan pada nilai probabilitas variabel X₁ adalah 0,1561, dengan hasil nilai yang lebih besar dari bentuk signifikan nilai 0,05. Sementara itu, hasil probabilitas dari variabel X₂ adalah 0,0190, ditemukan nilai signifikansi nya 0,05 maka nilai tersebut lebih kecil. Kemudian, hasil probabilitas variabel X₃ adalah 0,4324, yang juga lebih tinggi dari 0,05. Terakhir, probabilitas variabel Y adalah 0,0000, yang jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Oleh itu, dapat diartikan pada variabel X₁ dan X₃ memiliki distribusi yang mendekati normal, sementara variabel X₂ dan Y memiliki distribusi yang tidak normalitas. Namun, peneliti tetap akan melanjutkan penelitian dengan asumsi bahwa data telah berdistribusi normal berdasarkan teori teorema limit pusat yang menyatakan bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati Distribusi Normal jika ukuran sampelnya lebih besar dari 30 (Nurudin et al., 2014)

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bisa ditunjukkan ketika besaran tolerance ($1/VIF$) > 0,10 dan besaran $VIF < 10$ artinya multikolinearitas tidak terjadi. Hasil pengujian dalam situasi ini menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak ada. Namun uji multikolinearitas mendeteksi multikolinearitas jika hasil dari ($1/VIF$) < 0,10 dan pada $VIF > 10$. Hal ini menunjukkan adanya asosiasi yang tinggi antara sejumlah variabel independen, yang dapat menyulitkan untuk memahami temuan dan menyebabkan ketidakstabilan dalam analisis.

Table 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance (1/VIF)
IPM	1.32	0.758656
Tingkat Upah Minimum	1.02	0.983748
Tingkat Pengangguran	1.32	0.755835

Sumber: Olahan Data, 2023

Dilihat dari hasilnya, dinyatakan VIF pada variabel X1 = 1,32 < 10 dan nilai 1/VIF = 0,758656 > 0,10, nilai VIF Variabel X2 = 1,02 < 10 dan nilai 1/VIF = 0,983748 > 0,10, variabel X3 = 1,32 < 10 dan 1/VIF = 0,755835 > 0,10. Dengan lolosnya uji multikolinearitas.

c) Pemeriksaan Heteroskedastisitas

Pemeriksaan heterokedastisitas dapat dilakukan dengan memeriksa grafik *scatter* antara residual dan *fitted value* yang divisualisasikan dengan grafik *versus fits* pada gambar 2.

Gambar 2. Versus Fits

Sumber: Olahan Data, 2023

Tidak terjadi heteroskedastisitas pada data jika plot-plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Dari gambar, didapat bahwa plot-plot data telah menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus heterokedastisitas.

4.1.2 Uji Hipotesis

Table 3. Hasil Uji Regresi Linier

Variabel	Coef.	Std. Err.	t	P> t
IPM	-.0471433	.194682	-0.24	0.810
Tingkat Upah Minimum	2.95e-07	1.16e-06	0.25	0.801
Tingkat Pengangguran	-.415095	.4754469	-0.87	0.390
Pertumbuhan Ekonomi	13.21987	13213875	0.795	0.437
F (3, 30)8 = 0.45 Adj. R-Squared = -0.0526				
Prob > F = 0.7192 Root MSE = 3.7997				
R-Squared = 0.0431				

Sumber: Olahan Data, 2023

a) Uji T

Menurut hasil dari regresi sederhana data menggunakan software STATA, maka diperoleh hasil T-tabel dan T-hitung yakni: t tabel : 1,6973 atau -1,6973. Berdasarkan analisis statistik, nilai X_1 (-0,24) lebih besar dari nilai pada T-tabel. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat cukup data untuk menyangkal hipotesis nol (H_0) dan mendukung hipotesis alternatif (H_a). Sehubungan dengan hal tersebut, variabel X_1 , atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 meskipun secara statistik tidak signifikan.

Dalam hal ini, nilai T-tabel > nilai X_2 (0,25). Maka, bisa ditarik simpulan bahwa tidak terdapat cukup data untuk menolak H_0 dan mendukung H_a . Sehubungan dengan hal tersebut, variabel X_2 , atau Upah Minimum Provinsi (UMP) kemungkinan besar akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 meskipun secara statistik tidak signifikan.

T-tabel < X_3 (-0,87). Akibatnya, dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menerima H_a dan menolak H_0 . Artinya, meski variabel X_3 yaitu Tingkat Pengangguran berpengaruh baik terhadap pembangunan ekonomi, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada tahun 2022.

b) Uji Probabilitas ($P > |t|$)

Nilai probabilitas sebesar 0,810 untuk variabel X1 mengartikan bahwa variabel IPM menurut statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel yang diteliti. Hasil uji probabilitas tinggi dalam situasi ini berarti tidak ada informasi yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa variasi IPM secara signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi yang diteliti.

Temuan ini mendefinisikan variabel Upah Minimum secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor pertumbuhan ekonomi untuk variabel X2 dengan nilai probabilitas sebesar 0,801. Hasil uji kemungkinan tinggi berarti bahwa tidak ada cukup data untuk menyimpulkan bahwa perubahan upah minimum berdampak besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diamati.

Variabel X3 dengan probabilitas 0,390: Dalam hal ini, variabel tingkat pengangguran secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dengan skor tes probabilitas sebesar 0,390. Hasil uji kemungkinan tinggi berarti bahwa tidak ada cukup data untuk menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berdampak besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diamati.

c) Uji F

Terdapat hasil bahwa F-hitung kurang dari F-tabel berdasarkan perhitungan F-hitung yang keluar sebesar 0,45, dan perbandingannya dengan nilai F-tabel sebesar 3,316. Ini memungkinkan untuk menyetujui hipotesis nol sambil menolak hipotesis alternatif. Indeks Variabel X1 (IPM), X2 (Upah Minimum), maupun X3 (Tingkat Pengangguran) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2022.

d) Uji Probabilitas ($Prob > F$)

Analisis probabilitas $> F$ berdasarkan data yang tersedia menunjukkan bahwa nilai 0,7192 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) tidak terbukti dan hipotesis nol (H_o) diterima. Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran semuanya berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2022.

e) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi diatas diperoleh pada data dimana nilai dari koefisien determinasi (R -Square) adalah 0.0431, menjelaskan bahwa variasi tingkat IPM, UMP, dan Tingkat Pengangguran dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 4,31% kemudian sisanya diperlukan penjelasan yang lebih lanjut dengan melibatkan variabel lain untuk memahami hubungan yang ada yang tidak dicantumkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi penelitian ini menunjukkan bahwa ketika IPM meningkat, pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode regresi linier sederhana, ditemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh (Utami, 2020). Kemudian diperkuat dengan penelitian dari Fadila & Marwan di tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terbukti dari hasil analisis statistik, di mana nilai t-statistik IPM sebesar $-5.755719 \geq -1.66140$ (nilai t-tabel), dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0000 pada tingkat $\alpha = 5\%$.

4.2.2 Pengaruh Tingkat Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Data dan analisis statistik menunjukkan bahwa kenaikan tingkat upah minimum berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Winarto et al., 2022, Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *human capital* dan tingkat upah minimum regional memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian dari Hanifah & Hanifa (2021) mengungkapkan temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat upah minimum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan adanya peningkatan upah minimum

setiap tahun, hal ini dapat menyediakan penghasilan minimum yang dijamin kepada karyawan melalui mekanisme yang ditetapkan secara tahunan oleh otoritas terkait. Sebagai akibatnya, karyawan memiliki jaminan bahwa mereka akan menerima upah/penghasilan setidaknya pada tingkat minimum yang telah ditetapkan melalui proses otoritas tahunan.

4.2.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis regresi yang dilakukan, tingkat pengangguran terbukti memiliki dampak negatif yang kuat pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang tercapai. Didukung dengan penelitian terdahulu dari Salsabila et al., 2021, Tingkat pengangguran adalah faktor yang memiliki dampak negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Jumlah yang tinggi dari individu yang menganggur berkontribusi pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mencegah penurunan lebih lanjut dalam perekonomian. Diperkuat dengan penelitian Padang & Murtala (2020) yang mengatakan bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan adalah IPM, upah minimum dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada upah minimum dapat berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di Indonesia tahun 2022. Dengan Uji F menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPM, UMP dan tingkat pengangguran secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variasi IPM, UMP, dan tingkat pengangguran, menurut koefisien determinasi (*R-Square*), hanya mampu menyumbang 4,31% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Saran kepada peneliti selanjutnya apabila mengambil tema penelitian yang sama, diharapkan untuk dapat lebih mengkaji kembali baik referensi maupun sumber data yang diambil agar dapat memperkuat hasil kajian yang lebih baik, serta mampu mengembangkan objek penelitian ini dengan sumber terbaru,

menambahkan variable-variabel lain, ataupun menggunakan metode analisis lainnya untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan berkualitas.

REFERENSI

- Adriyanto, Prasetyo, & Khodijah. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 25–36.
- Anwar, M. (2019). Peran Serikat Pekerja dalam Menetapkan Upah Minimum sebagai Upaya Perlindungan Upah Bagi Tenaga Kerja. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6(1), 767–789.
- Arifin, S. R., & Fadllan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 38–59. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.4555>
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 106–114.
- Dewi, N. M. S., & Sutrisna, I. K. (2015). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(6), 621–636.
- Fitriani, F., Rahim, A., & Samsir, A. (2018). Analysis the Influence of Investment Level, Government Spending, Labor To Economic Growth in Bulukumba District. *Universitas Negeri Makassar*, 1–11. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/11007>
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
- Hartanti, D. (2019). Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Media Pembelajaran Interaktif Game Kahoot Berbasis Hypermedia. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 78–85.
- Herlina, H., & Bakar, A. (2023). Analisis Ability To Pay dan Willing To Pay Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mimika. 3(1), 20–42.
- Lilya, N., & Dewi, S. (n.d.). *PENGARUH KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI*.

- Marini, L., & Putri, N. T. (2020). Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar? *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 70–83. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>
- Nainggolan, L. E., Lie, D., Nainggolan, N. T., Sembiring, L. D., & Sudirman, A. (2021). Path Analysis of Economic Growth and Government Spending on Education Impact on the Human Development Index in Indonesia. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 51–60. <https://doi.org/10.53512/valid.v19i1.196>
- Naphat Wuttaphan. (2017). Human Capital Theory: the Theory of Human Resource Development, Implications, and Future. *Rajabhat J. Humanity Social Science* , 4(18), 240–253.
- Nenggar, W. W. (2019). *Analisis pengaruh aglomerasi, indeks pembangunan manusia dan tingkat upah terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017*. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Nurudin, M., Mara, M. N., & Kusnandar, D. (2014). *Ukuran sampel dan distribusi sampling dari beberapa variabel random kontinu*. 03(1), 1–6.
- Padang, L., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 9–16.
- Putra, I., Mahesa, P. N., & Yasa, I. N. M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara. *E-Jurnal EP Unud*, 9, 1804–1832.
- Rofii, A. M., & Ardyan, P. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (Pma) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 303–316.
- Salsabila, A. Y., Imanigsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Gerbang Kertosusila. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 35-45.
- Teneh, E. G., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2019). Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 72–83.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101-113.

Winarto, H., Zumaeroh, Z., & Retnowati, D. (2022). Pengaruh Human Capital, Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 190-194.